

Dinamika dan Agenda Politik Internasional Indonesia di Bawah Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Aspin Nur Arifin Rivai

Pendahuluan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Kepemimpinannya membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam era Reformasi. Berbekal dari pengalamannya sebagai seorang Jenderal militer, bahkan mengisi posisi strategis dalam kabinet pada kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri, mengantarkan SBY sebagai salah satu figur penting di hadapan masyarakat Indonesia saat itu. Hal ini tentunya memberi pengaruh besar bagi kemenangan SBY baik pada tahun 2004, maupun 2009. Kepemimpinan selama dua periode merupakan waktu yang cukup lama. Di tengah proses kepemimpinannya, pertanyaan yang bisa diajukan ialah apa *legacy* yang pernah ia torehkan dalam politik luar negeri Indonesia? Pertanyaan tersebut menjadi bahan diskusi yang akan penulis paparkan. Memasuki paskah perang dingin, utamanya dalam poros globalisasi merupakan tantangan besar bagi Indonesia. Isu-isu strategis mengantarkan Indonesia harus berjibaku dalam menghadapi perubahan yang ada. Persoalannya isu-isu tersebut mengalami kompleksitas baik dalam segi isu maupun cakupan aktornya. Pertama adanya pergeseran aktor yang tadinya kurang dianggap penting justru menjadi penantang baru dalam agenda globalisasi, seperti China. Kedua, suatu isu pada dasarnya tidak berdiri sebagai postur tunggal, isu internasional berkelindaan dengan isu-isu lainnya. Sederhananya isu keamanan manusia yang menjadi tren yang mengemuka dalam Abad 21 yang tadinya hanya berbicara lanskap kemanusiaan lambat laun beresonansi kepada progresifitas pembangunan domestik, lingkungan kawasan dan internasional untuk mengklaim isu tersebut menjadi bagian isu lain seperti pangan, ekonomi, politik, lingkungan, teknologi, dst. Melalui kompleksitas kepemimpinan SBY dari tahun 2004 hingga 2014 memetik banyak kondisi yang dihadapi oleh Indonesia. Sebenarnya begitu banyak praktik HI Indonesia dalam tahun tersebut, baik pada hubungan antara mitranya (bilateral), kawasan (regional), maupun lingkungan global. Sementara itu, dari kesemua kompleksitas yang ada paling tidak terdapat tiga kondisi yang dianggap menjadi problem kepemimpinannya. Yang pertama Indonesia dalam wilayah regional (ASEAN), kedua Indonesia dalam bingkai Negara besar AS – China, ketiga, Indonesia dalam pertarungan globalisasi. Tulisan ini tentunya sebagai telaah kritis terhadap ketiga variabel tersebut.

Indonesia dan Poros MEA

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang diselenggarakan pada tahun 2006 di Kuala Lumpur, terdapat komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi kawasan yang dikenal sebagai cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Semangat yang dilakukan oleh berbagai Negara anggota ASEAN dituai dalam melihat agenda regional telah menemukan suatu titik ketersalinggantungan ekonomi. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dalam menyambut MEA. Pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin Negara-negara ASEAN terhadap pembentukan MEA ini, semakin tercermin disepakatinya upaya percepatan poros MEA di tahun 2015. Kondisi ini dianggap sebagai momentum Indonesia dalam mengarungi poros ini sebagai jalan pembangunan yang lebih baik. Pada dasarnya MEA dijadikan sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi yang meliputi; pergerakan bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas modal dan bebas tenaga pekerja terampil. Perilaku ini sebagai bentuk terjalannya ruang neoliberalisme dalam kawasan

atau regional. Pada dasarnya orientasi neoliberalisme yang terjadi dalam regionalism ASEAN, tidak hadir begitu saja. Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang bebas dan aktif justru menghadapi suatu konfigurasi neoliberalisme akibat pengaruh besar dari Negara superior (AS), institusi internasional, hingga rezim yang ada. Lengsernya Soeharto yang kemudian beralih ditangan kepemimpinan Habibie sebagai ditandai konfigurasi neoliberalisme kedua (paskah krisis moneter) yaitu ditanda-tangani nota kesepahaman yang telah dibangun IMF untuk menstabilisasi perekonomian Indonesia. Upaya Habibie dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati yang melanjutkan pinjaman dengan IMF dan membangun kerangka kebijakan pembangunan berbasis “*structural adjustment program*” dengan dukungan dana dari beberapa lembaga donor: IMF, Bank Dunia, USAID, dll. (Hadiz & Robison, 2004). Bahkan dalam bayangan poros MEA sendiri yang selalu disebut era Pos Konsensus Washington, justru Indonesia sendiri terlebih dahulu menghadapi era tersebut. Carroll menyebut Indonesia pada dasarnya mengalami suatu konfigurasi Pos Konsensus Washington paskah tumbangnya Soeharto (Carroll, 2012). Era kepemimpinan Megawati memperlihatkan simpul menguatnya poros neoliberalisme yang dijalin Indonesia kepada ASEAN. Pada tahun 2003, pertemuan Bali Concord II menyepakati ASEAN Community yang diagendakan akan efektif terlaksana di dekade 2020.

Paskah penyepakatan poros MEA untuk tahun 2015 mengantarkan pertanyaan mendasar, apakah poros tersebut sebagai ancaman atau keuntungan bagi Indonesia? Dalam corak neoliberalisme yang terjalin dalam lingkungan regional, secara pasti akan mengundang persoalan mendasar yaitu jika tidak dilandasi oleh kesiapan ekonomi internal Negara yang ada di dalamnya. Terdapat dua indikator yang patut diperhatikan bagi setiap Negara dalam memasuki poros regionalism – pasar bebas. Pertama, kesiapan fundamental ekonomi. Kedua, eksistensi institusi dan regulasi yang kuat (Mantra, 2011:8). Dengan kata lain saat Negara masih berjibaku pada perbaikan kedua indikator tersebut, maka Negara tersebut mengalami ketertinggalan dalam laju regionalisme. Artinya dibutuhkan suatu upaya kesiapan yang matang dari suatu Negara untuk menghindari jebakan neoliberalisme itu sendiri. Asumsi ini paling tidak sebagai penguatan tesis Henry Kissinger – *foreign policy begins where domestic policy ends* (Jacobson & Zimmerman, 2008:139). Namun semangat SBY dalam memandang MEA sebagai poros yang begitu menguntungkan justru dianggap naif. Persoalannya dibalik optimisme dan komitmen yang kuat terhadap integrasi ekonomi kawasan, kondisi perekonomian Indonesia masih jauh dari kata yang secara faktual menghadapi terwujudnya MEA. Dalam mengkritisi posisi Indonesia saat itu dianggap terlalu prematur untuk mengambil ekspektasi yang kiranya Indonesia akan diuntungkan. Bahkan secara mendalam lagi, pemerintah Indonesia tidak memiliki suatu peta jalan yang jelas dalam meningkatkan kesiapan perekonomian Indonesia menghadapi integrasi tersebut. Dalam komparasi performa perekonomian diantara Negara-negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, Malaysia yang mengalami perkembangan signifikan. Berbicara poros pasar bebas tentunya menyandingkan dengan komodifikasi barang serta investasi.

Pada kenyataannya produk barang Indonesia justru memiliki daya saing yang lemah, baik dari sisi kualitas ataupun harga. Khususnya di bidang manufaktur, garmen dan tekstil, peringkat daya saing produk Indonesia di dunia semakin lemah. Beragam kebijakan ekonomi pemerintah di bawah paradigma neoliberalisme dalam bentuk pencabutan subsidi dan liberalisasi perdagangan, semakin melemahkan kekuatan produk Indonesia dalam bersaing dengan produk-produk asing. Dalam sektor tekstil misalnya, meningkatnya harga bahan bakar dan tarif dasar listrik sebagai imbas dari kebijakan penghapusan subsidi menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terbebani dengan mahalnya biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah. Diperparah lagi dengan serbuan produk tekstil dari Cina sebagai hasil dari dibukanya keran impor, semakin menekan kondisi pengusaha tekstil dalam negeri. Salah satu elemen inti lainnya dalam penciptaan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi adalah kebebasan investasi. Bebasnya ruang gerak di kawasan ini, diasumsikan dalam pandangan neoliberal, akan menyebabkan investasi bergerak ke tempat-tempat yang dinilai

menjanjikan keuntungan. Dengan kata lain, investasi akan mengalir deras ke wilayah-wilayah dengan iklim investasi yang dinilai baik. Ironisnya, di balik komitmen yang kuat menuju integrasi ekonomi ASEAN, iklim investasi Indonesia justru masih berada di bawah peringkat negara-negara lainnya di Asia Tenggara, terutama Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Laporan Bank Dunia dalam *Doing Business 2009*, peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia berada pada posisi 129, jauh berada di bawah Singapura (peringkat 1), Thailand (13), Malaysia (20), Brunei (88) dan Vietnam (92) (The World Bank, 2009:85-146). Dari fakta diatas menunjukkan sikap yang dituai oleh Indonesia saat itu kurang mempertimbangkan secara mendalam kondisi domestik yang ada, khususnya dalam sektor ekonomi dan perdagangan.

Doktrin MFZE: Antara Optimisme atau Pragmatisme?

Di masa kepemimpinan SBY pada periode kedua (2009-2015) mengeluarkan suatu sikap dalam agenda politik internasional yang dikenal sebagai Million Friends Zero Enemy (MFZE). Sikap yang digagasnya kemudian menjadi doktrin atau prinsip jitu dalam membawa Indonesia dalam pertarungan global – *all direction foreign policy*. Doktrin ini dimaksudkan untuk menampilkan citra Indonesia sebagai Negara yang mampu menjalin hubungan antar Negara (*all direction foreign policy*) dalam dunia yang sedang bergejolak dan keseimbangan dinamis. Prinsip ini paling tidak memungkinkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Artinya sikap ini dianggap netralitas dalam lingkungan politik global. Urgensi untuk mendesain citra positif pada era ini dianggap sebagai bangunan untuk menutupi Indonesia sebagai Negara yang diasosiasikan sebagai pelanggar HAM, bercokolnya jaringan terorisme, bahkan desain demokrasi yang justru menjadi palagan bagi koruptor. Tidak dapat dipungkiri, SBY memiliki kelihaihan menjadi figure penuh pencitraan. Hal ini berkorelasi dengan posisi Indonesia yang sering menjadi tuan rumah bagi perhelatan forum Internasional seperti putaran WTO dan pertemuan KAA. Dalam wilayah regional sendiri, Indonesia dipercaya sebagai mediator dari kasus konfliktual antara Thailand dan Kamboja. Bahkan dalam kefigurannya sendiri sempat menjadi kandidat perain Nobel perdamaian.

Beberapa contoh fenomena tersebut menunjukkan desain strategi SBY relative berhasil memperbaiki citra Indonesia di mata internasional. Namun mendayung di antara samudra yang bergejolak ternyata tidaklah semudah yang dikiaskan olehnya – MFZE. Dalam beberapa catatan yang ada doktrin ini dianggap inkonsistensi terkait suatu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia, bahkan menjadi sulit bersikap asertif sebab mengacu pada doktrin tersebut. Sebagai contoh persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kerap kali dihadapkan suatu persoalan mendasar yaitu ragu untuk memberi peringatan tegas pada Malaysia dan Arab Saudi yang justru mengadili tersangka dengan ancaman hukuman gantung. Berbeda dengan sikap yang dilakukan oleh kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Keduanya dinilai cukup serius memperhatikan persoalan perlindungan hak warga Negara meskipun diujung tanduk kematian di Negara Arab Saudi. Abdurrahman Wahid melakukan tindakan cepat dengan langsung menghubungi Raja Fahd untuk menunda vonis hukuman mati yang saat itu dikenal kasus Siti Zainab. Sedangkan SBY belum mampu mendorong Malaysia yang hingga saat itu menentang konsep *legally binding* dan standar perlindungan pekerja migran illegal berdasarkan HAM.

Keterpilihan SBY pada periode kedua membawa ekspektasi besar dari masyarakat Indonesia agar pemerintah lebih optimal dalam melakukan diplomasi tegas, namun dengan semboyan MFZE justru dianggap sebagai perilaku politik luar negeri yang sangat lunak. Bahkan melalui doktrin tersebut pada akhirnya mengokohkan sikap inkonsistensi. Dalam konflik yang tidak berkesudahan antara Palestina dan Isreal posisi Indonesia dianggap mendua. Di satu sisi pemerintah berkomitmen untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, disamping Indonesia berupaya untuk mendukung dan membantu persiapan kemerdekaan Palestina. Di sisi lain kontroversi muncul ketika Indonesia kembali bersikap tidak tegas dalam kasus penyanderaan Warga Negara Indonesia oleh Israel dalam kapal Asvi Marmara. Di samping itu doktrin ini

mengalami pelemahan seiring kurangnya sikap pemerintah memahami tendensi kedaulatan Negara dan perlindungan warga Negara. Di pemerintahan periode kedua, lagi-lagi Indonesia dihadapkan oleh sengketa perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu yang dinilai tidak mampu menjaga kedaulatan NKRI. Hingga tahun 2012, setidaknya tidak kurang dari tiga kilometer patok 104 di Kalimantan bergeser sehingga memperluas daerah Malaysia. Dalam keberlangsungan sikapnya tersebut acapkali mengundang kritik dikalangan pengamat atau penstudi HI Indonesia. Di hampir kebanyakan pandangan, sebagian mereka menganggap doktrin tersebut merupakan sikap optimisme yang terlalu dipaksakan dan sebagai spekulasi diplomasi yang justru intersep dengan prinsip bebas dan aktif. Hal ini bersandar pada kenyataan internasional yang sangat kompleks, dan Indonesia harus berjibaku dengan persoalan mendasar.

Menelusuri doktrin MFZE pada dasarnya bersamaan dengan pandangan yang diutarakan oleh Joseph Nye yaitu *paradox of plenty*. Konsep ini sebagai dalil teoritik bagi perlunya sikap persahabatan tanpa musuh dalam arena global saat ini (Nye, 2004). Posisi penulis menilai adanya doktrin tersebut memunculkan asumsi kritis secara mendasar. Dalam orientasi politik luar negeri acapkali berkorelasi dengan situasi yang dihadapi oleh Negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri dalam isu-isu global yang begitu strategis dan kompleks, selalu ada persoalan yang membingkainya. Tentunya sikap keberpihakan dan asertif menjadi rasional dalam kondisi tersebut. Dalam doktrin yang ditawarkan oleh SBY tentunya dihadapkan oleh persoalan mendasar, sementara itu doktrin tersebut mengandung sikap ketidak-tegasan dalam agenda politik luar negeri. Barangkali doktrin ini dalam analisis aktor internasional bisa dikatakan sebagai “strategi jalur ganda” (*dual-track strategy*) (Simon, 1995:21). Seperti halnya dalam kondisi regional, hampir kebanyakan Negara mengambil sikap tersebut sebagai jalur liberal-kapitalisme sebagai penuntun kebijakan ekonomi-politik yang sangat kental dengan retorika kesalingtergantungan ekonomi (*complex interdependence*), tetapi disisi lain kebijakan militer dan pertahanan memperlihatkan postur yang mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam dimensi pertahanan – keamanan terdapat paradoks dalam diskursus perdamaian ASEAN sendiri yang kemudian menjadi sprit bersama untuk menciptakan lingkungan regional yang harmonis justru mengalami peningkatan belanja militer terkesan ofensif (halnya dengan Indonesia). Sampai disini dapat terlihat retorika non-konfrontasional benar-benar hanya konstruksi gagasan namun terdengar paradoksal. Analisis penulis memandang sikap yang dituai oleh SBY melalui doktrin tersebut sebagai konsekuensi logis dari pergeseran perimbangan kekuatan global dari Barat yaitu AS dan Eropa ke Timur yaitu Asia Pasifik. Naiknya China menjadikan aliansi tradisional dengan hegemon menjadi dilematis. Kehadiran China dalam kontestasi baru global sebagai Negara besar (*great power*) tentunya bersifat dilematis bagi Indonesia. Bahkan, semenjak China dan AS tidak melakukan konfrontasi terbuka, peta aliansi juga semakin tidak menentu (Polimpung, 2014:82). Dalam situasi ini tentunya keberpihakan secara netral dianggap utopis, sebab keberpihakan secara tradisional semakin tidak relevan untuk kondisi saat itu. Sama halnya dengan prinsip bebas dan aktif, prinsip ini bukan sekedar tawaran ide melainkan kerangka acuan Indonesia saat menjadi Negara yang baru merdeka yang dihadapkan oleh dua Negara dominan yaitu AS dan Uni Soviet. Sikap Soekarno dan Hatta sangat jelas menempatkan kedua Negara tersebut, yang dimana Indonesia tidak larut pada dua kubu tersebut sebab Indonesia bukan bagian dari Negara yang berkonflik. Pandangan Evelyn Goh melihat eksistensi China pada panggung multilateralitas memaksa AS sulit untuk melakukan perimbangan kekuasaan (*balance of power*), sehingga AS lebih terkesan mengambil rute *hedging* terhadap China (Goh, 2005). Akurasi analisis Goh tidak serta-merta melihat posisi AS semata, selanjutnya Goh melihat ancaman yang akan dihadapi oleh Negara-negara kawasan seperti ASEAN. *Hedging* pada dasarnya strategi yang memungkinkan Negara untuk bermain-main di antara karang-karang besar (*great powers*). Hal ini dimaksudkan sebagai seperangkat strategi yang bertujuan untuk menghindari atau mengantisipasi kondisi mendesak yang mana Negara tidak bisa melakukan keberpihakan secara tegas (Goh, 2005: viii). Dengan doktrin MFZE kerap dianggap kaku dalam membawa Indonesia dihadapan dua kekuatan besar yang ada.

Indonesia di Bawah WTO

Pada tahun 2013 Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan Konferensi Tingkat Menteri ke 9 WTO. Pertemuan ini dilaksanakan di Bali, sehingga hasil dari keputusan tersebut dianggap sebagai putusan Putaran Bali (*Bali Round*). Dalam WTO sendiri, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pemimpin Group-33 bersama India. Sejak Putaran Doha tahun 2001, KTM WTO belum menyepakati keputusan final dalam sektor pertanian (*Agreement on Agriculture*). Artinya negosiasi mencapai konsensus membutuhkan 12 tahun sejak Putaran Bali. Moment ini tentunya dianggap penting bagi Indonesia sebagai pemimpin G-33 dan sebagai tuan rumah.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan yang terdiri dari: Perjanjian Fasilitas Perdagangan, Paket untuk Negara berkembang, Proposal pertanian – subsidi. Dalam ketiga kesepakatan tersebut, isu subsidi pertanian mengalami perdebatan yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan oleh disparitas kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang. Pada dasarnya proposal ketiga tersebut merupakan usulan dari Negara yang berafiliasi G-33 tentang isu ketahanan pangan. Tujuan mereka sangat jelas yaitu menghapuskan pembatasan pemberian subsidi untuk kepentingan cadangan pangan dalam rangka membantu petani dan masyarakat miskin (*peasant*). Tanpa adanya solusi permanen program ketahanan pangan Negara berkembang seperti India dan Indonesia pastinya akan terbentur dengan masalah batasan subsidi (*domestic support*) yang ditetapkan sebesar 10% dari nilai produksi nasional. Namun ditengah persoalan yang dihadapi oleh India dan Indonesia dengan lonjakan populasi yang tinggi, tentunya persoalan pangan harus menjadi prioritas utama. Di tengah pertemuan tersebut terjadi silang pendapat oleh kepentingan Negara maju untuk mengurangi subsidi Negara pada sektor pertanian, namun Negara G-33 menolak dengan lantang, khususnya India. Keprihatinan penulis ialah ada pada sikap Indonesia yang justru mengambil jalan kompromi dan melunak yang mengikuti Negara maju. Padahal posisi Indonesia sendiri sebagai pemimpin G-33 seharusnya mengambil sikap yaitu persamaan kolektif yang dihadapi oleh Negara berkembang yang acapkali dihadapkan oleh tersingkirnya petani kelas kecil oleh gempuran korporasi agribisnis. Selain itu dalam catatan yang ada, Indonesia selalu menghadapi lonjakan harga pangan yang kadangkala tidak menentu, ketergantungan impor, hingga kemiskinan petani yang menjadikan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia semakin menurun. Tentunya sikap yang ditempuh oleh Indonesia bisa menjadi petaka dihari esok yaitu krisis pangan.

Keberadaan Proposal subsidi pertanian sebenarnya menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor pertanian Indonesia. Namun, sayangnya sikap Indonesia – SBY justru menempuh pilihan lunak yaitu mengikuti skema Negara besar, dibanding membicarakan atau memperjuangkan persoalan pangan. Model diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia diluar dari marwah UU dan Prinsip bebas dan aktif – memberi kesejahteraan dan perlindungan kepada setiap warganya. Bahkan, temuan yang ada Indonesia melakukan *bargaining position* teradap proposal subsidi pertanian dengan kesepakatan Fasilitas Perdagangan yang tentunya semakin membuka arus impor dan meningkatkan nilai hutang Indonesia. Dalam menganalisa hal ini tentunya perlu membongkar terlebih dahulu modus kuasa yang terjadi dalam WTO itu sendiri. Menggunakan kerangka tipologi Barnett dan Duvall, mereka memposisikan postur kuasa terjalin ke berbagai bentuk, yaitu kekuasaan komplusif – memaksa, kekuasaan institusional, kekuasaan structural, dan kekuasaan produktif (Barnett & Duvall, 2005:18-22). Corak dalam modus kuasa WTO saat ini tergambar dari perilaku kekuasaan institusional yang dimana institusi ini pada akhirnya memantaskan kekuatan hegemon. Kedua, melalui kekuasaan produktif, lagi-lagi Negara hegemon menggunakan institusi untuk melakukan pembentukan subjek sosial dengan berbagai tindak kuasa melalui sistem pengetahuan atau pengarus-utamaan. Hal ini makin mengokohkan kekuatan hegemon untuk memainkan peranannya dalam level globalisasi, sehingga Negara berkembang lambat laun mengikuti skema dan tawaran yang diberikan. Hal ini yang kadangkala ditempuh oleh Indonesia dalam bayang pertarungan globalisasi.

Posisi Indonesia kurang memperhatikan implikasi jangka panjang akibat kesepakatan pada Paket Bali tersebut. Dalam melihat agenda globalisasi saat ini perlu mengkritisi kehadiran pasar atau korporasi. Dimensi pertanian atau pangan sebenarnya selalu dihadapkan posisi dilematis, khususnya Indonesia. Konfigurasi kuasa non Negara seperti korporasi global mulai memperlihatkan wajah sesungguhnya. Bahkan belakangan ini Negara yang memiliki kekuatan pangan lambat laun menghadapi tantangan oleh adanya dominasi korporasi agribisnis seperti Monsanto. Celakanya ialah Indonesia justru dikepemimpinan SBY belum mendikurisasi persoalan pangan sebagai persoalan yang urgen, nyatanya terlihat sikap Indonesia mengikuti kemauan Negara maju dalam pengurangan subsidi pertanian. Bagi Pierre Bourdieu (1998) telah menghawatirkan kondisi dimana korporasi atau pasar lambat laun menjadi pelaku tiran di era globalisasi saat ini. Dalam ungkapannya menyebut, tirani pasar terjadi ketika “tangan kanan Negara – teknokrat kementerian dan cabinet pemerintahan sudah tidak mau tahu lagi tahu tentang kehidupan dari “tangan kiri Negara” – yakni mereka yang disebut sebagai lapisan pekerja sosial (Bourdieu, 1998:1-2). Artinya saat Negara hampir atau terjadi keabsenan mengurus persoalan mendasar seperti pangan dan keselamatan para petani, maka saat itulah Negara menstimulus pasar menjadi aktor tirani baru. Hal ini bermaksud yaitu dominasi pasar akan membanjiri sektor pertanian mulai dari penguasaan tanah, pekerja, hasil pertanian, hingga penjualan dst akan diatur oleh pasar.

Daftar Pustaka

- Barnett, Michael. & Duvall, Raymond. (2005). *Power in Global Governance*. New York: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. (1998). *Acts Of Resistance: Against the Tyranny of the Market*. New York: The New Press.
- Carroll, T. (2010). *Delusion of Development: The World Bank and The Post- Washington Consensus in Southeast Asia*. New York: Palgrave.
- Goh, E. (2005). “Meeting the China Challenge: The US in Southeast Asian regional security strategies”. *Policy studies*, Vol. 16.
- Jacobson, Harold. & Zimmerman, William. (2009). *The Shaping of Foreign Policy*. USA: Transaction Publishers.
- Mantra, Dodi. (2011). *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Bekasi: Mantra Press.
- Nye, Joseph. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Polimpung, Yosie. (2014). “Perubahan Sistem Internasional pada Abad ke-21 dan Keberpihakan Politik Luar Negeri Poros Maritim”, Dalam Husain, Conen (ed). *Membedah Tantangan Jokowi – JK*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Robison, R. & Hadiz, V.R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Simon, Sheldon W. (1995). “Realism and Neoliberalism: International Relations Theory and Southeast Asian Security”. *Pacific review*, Vol. 8 (1).
- The World Bank. (2007). *Doing Business 2008: Comparing Regulation in 178 Economies*. Washington D.C.: World Bank.